

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara dominan menggunakan strategi *denial*, *diminishment*, dan *bolstering* sebagaimana diklasifikasikan dalam *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT). Strategi *denial* terlihat dalam bentuk *attacking the accuser*, yaitu ketika Presiden secara terbuka mengejek dan mendiskreditkan para pengkritik, seperti pada kutipan “ndasmu” atau penyamaan kritik dengan propaganda ala Nazi, yang bertujuan untuk melemahkan kredibilitas lawan. *Diminishment* digunakan untuk menurunkan persepsi krisis (*justification*), misalnya dengan menyebutkan bahwa perbedaan persepsi tentang “Indonesia Gelap” adalah hal subjektif, atau membandingkan skala Indonesia dengan Eropa dan Timor Leste guna membenarkan kebijakan kabinet besar. Sementara itu *bolstering* muncul melalui *reminding* dan *ingratiation*; Presiden mengingatkan publik tentang capaian konkret seperti distribusi makanan bergizi ke jutaan anak, serta membangun kedekatan emosional dengan generasi muda sebagai target penerima manfaat. Strategi-strategi ini membentuk pola komunikasi yang menekankan pembelaan diri, penguatan citra, serta pemindahan fokus dari krisis ke arah legitimasi program dan hasil yang dijanjikan.

Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa strategi komunikasi krisis yang digunakan Presiden Prabowo Subianto tidak sesuai dengan rekomendasi *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT), khususnya dalam konteks krisis berjenis *preventable*. Strategi yang digunakan melanggar lima rekomendasi penting SCCT (no. 6, 7, 8, 9, dan 12) karena tidak mengadopsi pendekatan *rebuilding* seperti permintaan maaf, pengakuan kesalahan, atau tindakan korektif. Sebaliknya, penggunaan *denial* terhadap kritik faktual, ketidakhadiran solusi konkret, serta pesan yang inkonsisten memperlemah efektivitas komunikasi krisis. Jika dibandingkan dengan pendekatan pemimpin lain yang lebih akomodatif dan empatik, strategi Presiden Prabowo Subianto cenderung memperburuk persepsi

publik karena tidak membangun rasa kedekatan atau kepercayaan, sehingga menimbulkan risiko penurunan legitimasi dan kepuasan publik dalam jangka panjang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti menyadari masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut baik dalam konteks akademis maupun praktis. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya maupun bagi pihak-pihak terkait dalam menghadapi dan mengelola krisis komunikasi.

5.2.1 Saran Akademis

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pendekatan teori dan data yang digunakan. Meskipun menggunakan teori *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT), penelitian ini belum menggali secara mendalam aspek emosi publik, seperti yang ditawarkan oleh model lain (*Integrated Crisis Mapping*) atau pendekatan berbasis emosi dalam SCCT. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan analisis emosi atau persepsi publik terhadap strategi komunikasi yang digunakan pemerintah, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak dari strategi tersebut. Selain itu, pendekatan metodologis dapat diperluas dengan menggunakan triangulasi data seperti wawancara mendalam, analisis media sosial, atau *Focus Group Discussion* agar memperoleh pemahaman yang lebih kaya tentang persepsi masyarakat.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan efek strategi komunikasi krisis terhadap generasi muda, khususnya Generasi Z, yang merupakan kelompok pemilih terbesar dalam Pemilu 2024. Generasi ini dikenal sangat aktif di media sosial, memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu keadilan sosial, dan menunjukkan keterlibatan emosional yang kuat dalam dinamika politik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan

untuk mengeksplorasi bagaimana Gen Z merespons strategi komunikasi pemerintah, baik melalui analisis media sosial maupun studi persepsi publik yang berfokus pada kelompok usia ini. Pendekatan ini dapat memberikan wawasan yang lebih tajam mengenai efektivitas komunikasi krisis dalam konteks masyarakat digital dan terpolarisasi.

5.2.2 Saran Praktis

Subbab ini merupakan refleksi peneliti terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, khususnya dalam konteks strategi komunikasi krisis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi kasus yang termasuk dalam kategori *Preventable Cluster*. Berdasarkan temuan penelitian, strategi komunikasi yang digunakan cenderung bersifat defensif dan mengandung unsur penyangkalan (*denial*), baik oleh Presiden maupun oleh jajaran pemerintahan secara lebih luas. Pendekatan semacam ini berisiko menimbulkan ketegangan dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar pemerintah, khususnya dalam konteks komunikasi politik di masa krisis, mulai mengadopsi strategi komunikasi yang lebih komunikatif, transparan, dan kolaboratif. Pemerintah perlu menunjukkan keterbukaan dalam mengakui permasalahan, menyampaikan perkembangan kebijakan dengan jujur, serta melibatkan publik dalam proses komunikasi. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi pemerintah, meredam polarisasi, dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.